



Foto: Feiny Sentosa

Ibu Suyamsih in action pada bulan Juni 2011: "Dinas Pendidikan mengeluarkan kebijakan. Implementasinya terserah pada kita".

## Kesetaraan Gender menjelang 2015 di Sleman: Profil Praktik yang Baik

Kabupaten Sleman mempunyai visi kesetaraan gender dalam pendidikan menjelang tahun 2015. Di bawah kepemimpinan Ibu Suyamsih sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender telah dibentuk pada tahun 2010 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam cara yang lebih nyata. Dengan alokasi anggaran pendidikan daerah sebesar hampir 30% dari APBD, dukungan atas pengarusutamaan gender semakin meningkat dari tahun ke tahun, mencapai Rp 50 juta di tahun 2010.

Dalam diskusi dengan pemangku kepentingan pendidikan di Sleman pada bulan Mei 2011 lalu, tim Kabar Pendidikan menemukan bahwa pejabat dari berbagai departemen dan pengawas, guru, dan kepala sekolah telah memiliki pemahaman yang cukup bagus mengenai kesetaraan gender dan juga berkomitmen kuat untuk mengarusutamakan gender. Hal ini makin menjadi lebih jelas ketika kami berkunjung ke beberapa sekolah yang terlibat dalam pilot program kabupaten Sleman. Kepala Sekolah SD Klegung 1, SMPN 1 Tempel, dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Ngudi Ngelmu mengelola sekolah mereka dengan perspektif gender.

Apa artinya ini dalam praktik? Sekolah-sekolah ini mengumpulkan berbagai data terilah tentang anak perempuan dan laki-laki, menyediakan toilet yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan, dan para guru juga harus memastikan bahwa mereka tidak mendiskriminasi anak laki-laki dan perempuan, memberikan mereka kesempatan yang sama dalam proses belajar dan peluang yang sama untuk sukses. Pengaturan kelompok dan tugas kelas juga mempertimbangkan gender.



Foto: Feiny Sentosa



Foto: Feiny Sentosa

Meskipun saat ini ada perhatian dalam hal gender di sekolah, masih banyak lagi yang harus kita lakukan, terutama di luar kelas. Walaupun komite sekolah mendukung kesetaraan gender secara umum, peran mereka bisa ditingkatkan. Demikian pula kesetaraan gender bisa digalakkan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Bagaimana Ibu Suyamsih dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender bisa mencapai hal ini? Mereka menyampaikan beberapa faktor pendukungnya:

- Seluruh unsur tingkat sekolah harus ikut terlibat: pengawas, kepala sekolah, guru dan komite sekolah. Setiap sekolah perlu staf kunci (*focal point*) sehingga jaringan bisa berjalan baik
- Instrumen monitoring dan evaluasi harus bisa menangkap informasi gender
- Pelatihan mengenai pengarusutamaan gender terbukti sangat membantu: di Sleman, sebuah tim dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Negeri Yogyakarta mengembangkan sebuah modul untuk ini.
- Kelompok kerja sekolah seperti KKG dan MGMP bisa membantu menyebarkan informasi lebih lanjut.

Informasi lebih lanjut mengenai Praktik yang Baik bisa didapatkan secara online di: [www.dit-plp.go.id/bec/gpin](http://www.dit-plp.go.id/bec/gpin), dan juga di [www.wapikweb.org](http://www.wapikweb.org). Tulisan praktik yang baik juga dapat langsung diunggah pada situs WAPIK atau dapat dikirim ke [kontakwapik@gmail.com](mailto:kontakwapik@gmail.com)

# KABAR PENDIDIKAN

EDISI 3  
JULI 2011

## Dalam Edisi Ini:

**Menjadi Bijak dalam Gender: Bukan hanya tentang Perempuan, Laki-laki juga**

**Kesenjangan Gender Dulu dan Kini**

**Cerita di tingkat kabupaten di 29 kabupaten di bawah program BEC-TF**

**Apakah Anda Tahu...**

**Temuan dari Studi Terbaru tentang Kualitas Pendidikan di Madrasah**

**Modul Baru Pelatihan Pengarusutamaan Gender**

**Hasil Belajar Siswa menunjukkan turunya kesenjangan gender : DBE 2**

**Australia mendukung sekolah baru dengan perspektif gender**

**Kesetaraan Gender menjelang 2015 di Sleman: Profil Praktik yang Baik**



# Pengarusutamaan Gender

## Menjadi Bijak dalam Gender: Bukan hanya tentang Perempuan, Laki-laki juga

**Hamid Muhammad adalah Direktur Jenderal untuk Pendidikan Formal dan Informal dan beliau sangat bersemangat mengenai topik kesetaraan gender.**

"Kami sudah melakukan semua yang bisa kita lakukan, namun masih saja kami temukan kesenjangan itu. Pengarusutamaan gender ini bukan hanya mengenai perempuan, tetapi juga laki-laki. Menurut data Kementerian, para pemegang prestasi tertinggi dalam Ujian Nasional tahun ini adalah perempuan, jadi dalam kenyataannya kita harus mulai mempertimbangkan bagaimana kita dapat mengatasi persoalan prestasi siswa laki-laki di sekolah, dan kami merencanakan untuk meneliti hal ini untuk mendapatkan kejelasan tentang apa yang menjadi penyebabnya. Angka partisipasi sekolah kita telah mencapai keseimbangan gender, namun kita masih perlu khawatir dengan persoalan gender ini. Memang, kita bisa saja sensitif terhadap persoalan gender, tapi masih terdapat kesenjangan dalam menterjemahkan kebijakan menjadi sebuah praktik dan program yang nyata. Yang sungguh membuat frustrasi adalah ketika menyadari bahwa meskipun di sekolah dasar sekitar 70% gurunya adalah perempuan, seringkali jabatan kepala sekolah diberikan kepada laki-laki. Pola ini terus berulang dalam sistem kita, termasuk dalam hal promosi dan pemilihan pejabat pendidikan. Masalah ini sudah mulai diatasi di Kementerian saat ini dengan mengadopsi sebuah pendekatan baru. Ketika ada dua orang kandidat dengan kualifikasi



Photo: Gedsiri Suhartono

Berpartisipasi dalam perencanaan, Kebumen, April 2010: Pejabat kecamatan memberikan masukan dalam Musrenbang Kabupaten Kebumen

yang sama, kami akan memilih kandidat perempuan dibandingkan yang laki-laki untuk lebih mendorong kesetaraan gender di tingkat yang lebih tinggi. Selain itu ada juga beberapa inisiatif baru yang harus mulai kami pertimbangkan: melanjutkan pelatihan mengenai kesadaran gender, dan memperluas pelatihan ini ke tingkat pemerintah daerah dan membantu mereka untuk mengajukan anggaran dan rencana yang mempertimbangkan persoalan gender, sesuai yang telah dirumuskan oleh Kementerian Keuangan. Kami perlu meninjau kembali buku-buku teks sekolah untuk memastikan bahwa stereotip kuno mengenai peran perempuan dan laki-laki tidak lagi ditekankan. Demikian juga kami harus mereview kurikulum dengan kacamata gender dan mendorong sekolah untuk melakukan hal yang sama."

## Kesenjangan Gender Dulu dan Kini

Menurut data survei nasional (Susenas 2009) beberapa kesenjangan gender semakin menyempit di Indonesia:

- Pada kelompok usia 15-24, 99.5% laki-laki dan 99.4% perempuan sekarang sudah melek huruf.
- Kesenjangan gender pada transisi sekolah dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama sudah tidak ada di awal tahun 2000an, dan sampai dengan 2007 kesenjangan dari sekolah menengah pertama dan ke sekolah menengah atas juga sudah tidak ada, namun muncul kembali di tahun 2009.

Beberapa kesenjangan gender masih ada:

- Semakin rendah tingkat sekolah, semakin tinggi proporsi guru perempuan (di tingkat pra-sekolah 97% guru adalah perempuan, dan di sekolah menengah atas 49% saja), sementara hanya 25% guru yang bersertifikasi adalah perempuan - data dari Kemendiknas 2008
- Anak laki-laki mempunyai kecenderungan untuk *drop out* dibandingkan perempuan di semua tingkat, dengan variasi yang berbeda-beda di masing-masing provinsi (Susenas 2009).

**BANK DUNIA INDONESIA**  
Gedung Bursa Efek Indonesia,  
Lantai 12, Menara 2  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
[www.worldbank.org/id/education](http://www.worldbank.org/id/education)  
[www.dit-plp.go.id/bec](http://www.dit-plp.go.id/bec)

Telepon: (62) 21 52993000  
Fax: (62) 21 52993111  
E-mail: [stow@worldbank.org](mailto:stow@worldbank.org)



# Apakah Anda Tahu...

- Tujuan Pembangunan Milenium Ketiga adalah Mendorong Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan, menghapus ketidakseimbangan gender dalam pendidikan dasar dan menengah, terutama sebelum 2005, dan untuk semua tingkat pendidikan paling lambat pada tahun 2015.
- Indikator yang dipakai dalam Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index/GDI*) sama dengan yang dipakai dalam *Human Development Index* (HDI). Perbedaannya adalah GDI menggunakan data yang terpilah sehingga menunjukkan ketidaksetaraan dalam pencapaian antara perempuan dan laki-laki.
- Angka melek huruf pada kelompok usia di atas 15 ta-

hun adalah 92.58% (BPS 2009). Tapi, masih ada ketidakseimbangan dalam hal gender dan wilayah (perkotaan dan pedesaan). Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sangat lebar di wilayah pedesaan, 93.46% angka melek huruf pada laki-laki dan 85.62% pada perempuan.

- Menurut Laporan UNDP 2010, **Indeks Ketidaksetaraan Gender** (*Gender Inequality Index*) yang menggunakan indikator yang agak berbeda dengan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia menempati urutan 100 sedunia dari 138 negara. Urutan ini di bawah negara tetangga seperti Singapura (urutan 10), Malaysia (urutan 50), Vietnam (urutan 58), Thailand (urutan 69), Filipina (urutan 78), Laos (urutan 88) and Kamboja (urutan 95).

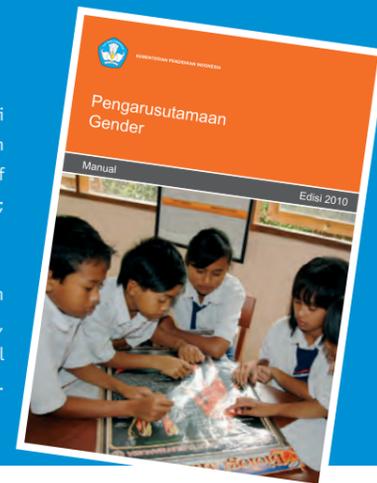
## Modul Baru Pelatihan Pengarusutamaan Gender

Modul Pelatihan dua hari penuh ini menggabungkan berbagai poin penting dari modul-modul terdahulu yang dikembangkan oleh berbagai mitra pembangunan dalam bidang pengarusutamaan gender dan disusun dengan kerjasama yang erat antara berbagai kementerian termasuk Kemdiknas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Ditujukan untuk tim teknis dan fasilitator, modul ini memuat panduan langkah-demi-langkah mengenai "Apa dan Bagaimana" dalam pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan gender secara umum maupun dalam program pendidikan.

Topik yang dibahas antara lain meliputi: Pengenalan Mengenai Konsep Dasar Gender dan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan; Perencanaan dan Anggaran yang Responsif Gender, Data dan Indikator Gender, Model Analisis Gender; Langkah dalam Mengarusutamakan Gender, dan Rencana Aksi.

Pendekatan yang dipakai meliputi diskusi kelompok besar dan kecil, serta simulasi dan refleksi. Modul berisikan rencana unit, presentasi power point, lembar kerja dan bahan bacaan. Modul bisa diakses melalui <http://dit-plp.go.id/bec/modules/gender>.



## Cerita di tingkat kabupaten di 29 kabupaten di bawah program BEC-TF

Di bawah program *Basic Education Capacity Trust Fund* (BEC-TF), 29 kabupaten telah menyelesaikan survei tentang pengarusutamaan gender pada tahun 2010. Tidak mengherankan, survei tersebut menemukan bahwa perempuan kurang terwakili dalam posisi-posisi di manajemen pendidikan di level pemerintah daerah. Hanya 10% dari pejabat Eselon II yang berjenis kelamin perempuan, dan persentasenya hanya sedikit di atas itu pada tingkat Eselon III. Proporsi perempuan dua kali lipat di tingkat Eselon IV dan mencapai hampir 40% untuk staf di level yang lebih rendah. Semakin rendah levelnya, semakin banyak staf perempuannya.



Ibu Sri Whayuningtyas, Kepala Bidang Pendidikan di Kota Malang menjawab pertanyaan wartawan saat promosi program BOS di tahun 2010.

Dewan Pendidikan juga dilaporkan memiliki tingkat partisipasi perempuan sebanyak antara 10-30%. BEC-TF saat ini berupaya mendorong 50 kabupaten binaan untuk pengarusutamaan gender dan tidak hanya mempromosikan peran perempuan di manajemen dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran dan menelusuri kemajuannya melalui

data gender yang terpilah. Hal ini merupakan proses yang lama dan lambat, namun terutama di kabupaten yang telah menerapkan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sejalan dengan Peraturan Presiden No 5/2010, kemungkinan kemajuan akan lebih cepat. Saat ini hanya ada 6 dari total 29 kabupaten BEC yang disurvei yang telah membentuk Kelompok Kerja yang dimaksud.

Kelas praktik Matematika untuk anak laki-laki dan perempuan.



Foto: Unicef

Mengikuti Tes Berstandar di Madrasah.



Foto: Peter Riddle-Carre

## Temuan dari Studi Terbaru tentang Kualitas Pendidikan di Madrasah

Menurut studi terbaru dari 150 Madrasah Tsanawiyah yang dipilih secara acak di berbagai wilayah di bagian Timur, Tengah dan Barat Indonesia, ada beberapa perbedaan gender dalam pencapaian prestasi yang secara umum juga ditemukan di banyak negara: anak perempuan menunjukkan hasil belajar yang lebih bagus dari anak laki-laki dalam tes Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dan anak laki-laki lebih bagus dari perempuan di bidang ilmu sains. Tidak ada perbedaan gender untuk Matematika. Studi ini merekomendasikan perlunya upaya khusus untuk mendukung perbaikan dalam bahasa Inggris untuk anak laki-laki.

Secara umum, perbedaan dalam sikap siswa dalam kehidupan sekolahnya hanya sedikit, meskipun

siswa perempuan menunjukkan sikap yang sedikit lebih positif mengenai relevansi pelajaran sekolahnya dengan masa depan mereka. Sekitar 52.6% guru Madrasah Tsanawiyah adalah laki-laki dan 46.8% perempuan, hampir sama dengan proporsi di sekolah umum di bawah Kemdiknas.

Studi ini dilakukan atas permintaan dari Kementerian Agama / Direktorat Jenderal Pendidikan Agama, oleh *Australian Council for Education Research* (Lembaga Riset Australia untuk Pendidikan), Universitas Pendidikan Indonesia, *Basic Education Capacity Trust Fund*, dan didukung oleh AusAID, Pemerintah Kerajaan Belanda dan Komisi Eropa. Laporan dan brief bisa didapatkan secara online di [www.worldbank.org/id/education](http://www.worldbank.org/id/education)

## Hasil Belajar Siswa menunjukkan turunnya kesenjangan gender: DBE 2

Serangkaian pendekatan pembelajaran aktif yang inovatif yang dilakukan melalui program guru dalam jabatan di bawah program *Decentralized Basic Education 2* (DBE 2) USAID telah menunjukkan pengaruh positif pada hasil belajar siswa dan dalam menurunkan kesenjangan capaian di antara siswa perempuan dan laki-laki. Guru belajar berbagai macam strategi untuk mengoptimalkan kemampuan siswa untuk memahami isi pelajaran. Kegiatan tersebut meliputi penggunaan teknik belajar yang kooperatif dan taktik yang mengakomodir perbedaan gender. Pendekatan pembelajaran aktif menekankan pada pemberian kesempatan pada siswa untuk belajar dari paparan yang riil dan langsung, seperti mengukur obyek, atau membangun model. Siswa didorong untuk mengaplikasikan pengetahuannya secara aktif, berinteraksi dengan konsep baru, bertukar pikiran dan bercurah pendapat. Dengan memberikan kesempatan yang setara bagi siswa laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi, guru telah berhasil meningkatkan pembelajaran bagi siswa secara adil.

Hasil pasca-tes tahunan menunjukkan tren yang terus berlanjut tentang semakin kecilnya perbedaan hasil belajar Matematika di antara siswa laki-laki dan perempuan. Dari tahun 2007 hingga 2009, kesenjangan gender menurun dari 6 persen menjadi 3 persen di Kelas 6, dan kemudian dari 3 persen ke 1 persen dari tahun 2009 ke 2010. Penurunan perbedaan gender ini dipertahankan sejalan dengan naiknya persentasi keseluruhan dalam keberhasilan siswa untuk mencapai dan bahkan melewati kompetensi yang disyaratkan untuk pelajaran Matematika Kelas 6, kontras dengan sekolah-sekolah pembandingan (kelompok kontrol), yang secara relatif masih tidak berubah dari 2007 ke 2010. Hal ini mengisyaratkan bahwa strategi pengajaran DBE 2 yang diterapkan di seluruh sekolah tidak hanya efektif dalam meningkatkan pembelajaran Matematika tapi juga dalam menurunkan perbedaan hasil belajar antara kelompok gender yang berbeda.

Guru mengatur siswa perempuan dan laki-laki untuk bekerja dalam kelompok.



Foto: DBE2

## Australia mendukung sekolah baru dengan perspektif gender

Selama lima tahun terakhir ini Program Pendidikan Dasar Australia-Indonesia (Australia Indonesia Basic Education Program atau AIBEP/BEP) telah memberikan dukungan untuk meningkatkan kesetaraan gender bagi anak perempuan dan wanita Indonesia dalam mendapatkan akses dan berpartisipasi dalam berbagai aspek di dalam sistem pendidikan. Dukungan ini meliputi bantuan kepada Kemdiknas dalam pengembangan Peraturan Kemdiknas No. 84/2008 tentang Pengarusutamaan Gender.

Melalui AIBEP, lokakarya tentang pengembangan holistik bagi sekolah dan kabupaten (*Whole School Development and Whole District Development* atau WSD/WDD) telah dilaksanakan untuk lebih dari 12.000 perwakilan dari 2.047 sekolah binaan AIBEP dan lebih dari 3.000 perwakilan dari 20 provinsi.

Berdasarkan dari hasil survei tahunan sekolah AIBEP, 80% dari sekolah BEP saat ini telah memiliki kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Rencana Pengembangan Sekolah dan 80% dari kabupaten di mana sekolah BEP berada telah memiliki berbagai kebijakan Pengarusutamaan Gender di Rencana Pengembangan Sektor Kabupaten. Hal ini menekankan pentingnya praktik non diskriminatif di dalam kelas dan dalam kepemimpinan dan perlunya untuk mempromosikan lebih jauh tentang pendidikan setelah sekolah menengah pertama bagi anak perempuan. Pada sekolah-sekolah yang dibangun oleh BEP, hampir 90% dari lulusan Kelas 9 melanjutkan pendidikan tanpa perbedaan antara siswa perempuan atau laki-laki pada transisi tersebut.

Lelaki juga bisa menenun.



Foto: Feiny Sentosa